PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS PADA KABUPATEN KAMPAR

Maulina Agustiningsih

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
***e-mail* : maulinaagustiningsih8@gmail.com**

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of the application of good governance in the management of village funds in Kampar Regency. The population in this study used all villages in Kampar District with 242 villages. The sampling was done through purposive sampling technique with a total sample of 34 villages in Kampar Regency. Data was collected through a questionnaire with research subjects being the headman, village secretary, financial officer and section head. The analytical method contained in this research is Partial Leats Square (PLS) through the WarpPLS 6.0 application. The hypothesis obtained from the test results shows that the application of good governance influences the management of village funds. Based on the results of the study it can be concluded that by implementing good governance in the management of village funds will be able to realize good village fund management through transparency, accountability and participation from the community.

***Keywords**: Implementation of good governance; village fund management*

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemerintah disetiap tahunnya telah melakukan penganggaran untuk dana desa mencapai angaka 1 (satu) milyar rupiah yang akan diberikan ke setiap desa di seluruh Indonesia (*buku panduan dana desa*). Dengan anggaran yang besar diberikan oleh pemerintah untuk setiap desa perlu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan dari akuntabilitas vertikal menjadi pertanggung jawaban akuntabilitas horizontal yang ada didalam pengelolaan dana desa (Taufik Taufeni, 2009). Wewenang penuh diberika oleh pemerintah kepada masing-masing desa didalam aktivitas pengelolaannya, ini dihaarapkan untuk bisa membangun desa dan masyarakat yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam hal ini pengelolaan dana desa akan dilakukan oleh aparatur desa melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi. Hal ini tentu diharapkan dengan dana desa yang besar diberikan pemerintah kepada masing-masing desa untuk dapat dilakukan pengelolaan sebaik mungkin dari aparatur desa agar tujuan yang diharapkan mampu dicapai. Namun disayangkan selama program dana desa diberlakukan telah banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi didesa hingga menimbulkan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum dilakukan oleh aparatur desa. Ini dibuktikan dengan terjadinya temuan langsung oleh Mentri DPDTT dalam persoalan penyalahgunaan dana desa pada desa Sawah Besar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

Persoalan yang terjadi merupakan salah prioritas dalam penggunaan dana desa yang dilakukan aparatur desa dengan membangun gapura yang tidak sesuai menurut PERMENDES Nomor 11 Tahun 2019 mengenai perioritas dalam

penggunaan dana desa (Zulqaidah, 2016). Selanjutnya kasus *markup* pada dana desa yang dilakukan oleh kepala desa di Tanjung Alai Kecamatan XII Koto Kampar dalam pembuatan area parkir (wwww.Harianbrantas.co.id). Dan adanya temuan yang diperoleh dari LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau memperlihatkan dalam laporan keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2015 terdapat belanja transfer keuangan desa yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp.3.609.298.623. Hal ini lah menunjukan selama diberlakukannya program dana desa telah mendatangkan persolaan dan masalah terkait kasus hukum yang dilakukan oleh aparatur desa. Tercatat telah terjadi 181 kasus korupsi yang dilakukan aparat desa dengan kerugian yang dialami oleh negara mencapai Rp.40,6 milyar menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW*).

Dengan tingginya potensi kasus dan kerugian yang terjadi didalam program dana desa menimbulkan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah sendiri kepada aparatur desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan tata kelola yang baik (Taufik Taufeni, 2019). Tata kelola yang baik sering disebut dengan *good governance* (Mardiasmo, 2009). Perlu dilakukannya penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa oleh aparatur desa agar mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat, sehingga permasalahan dan kasus yang terjadi didalam pengelolaan dana desa mampu di atasi. Selain itu, penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa bisa mewujudkan pertumbuhan yang baik bagi sektor publik yang akan lebih berdampak sinergis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya banyak lebih mengarah untuk mengetahui tentang efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai pada penelitian yang telah dilakukan oleh Asni (2013) dan Thomas (2013).

Untuk mengetahui pentingnya penerapan *good governance* pada sektor publik, kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah telah dilakukan penelitian oleh Taufik Taufeni, *et al.,* 2013. Rustiarini (2016) juga telah melakukan penelitain terhadap pengaruh *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang hanya sebatas pada keterkaitan secara normatif saja sesuai dengan mekanisme dalam peraturan. Selanjutnya terhadap pentingnya akuntabilitas yang ditekankan didalan *non governnce organization* pada organisasi nirlaba telah dilakukan oleh Said, *et al.,* 2018.

Adapun dalam penerapan *good governance* yang dilakukan pada pengelolaan dana desa masih jarang ditemukan topik penelitian tersebut. Oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa yang ada pada desa di Kabupaten Kampar.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Penerapan teori keagenan didalam organisasi sektor publik dapat menyatakan bahwa negara demokrasi mederen pada dasarnya memiliki serangkaian hubungan yang berkaitan dengan *prinsipal-agen* yang dikemukan oleh Keller (2003). Dalam hal ini *agency theory* memiliki hubungan untuk usaha memberikan jawaban terkait persoalan keagenan yang terjadi pada para pihak yang melakukan kerja sama dengan tujuan dan pembagian kerja yang berbeda didalam aktivitas pengelolaan dana desa.

Sering ditemukannya *informatif asymmentry* yang terjadi antara pihak agen (pemerintah) dalam hal ini memiliki akses penuh serta langsung terhadap informasi yang berhubungan dengan para pihak prinsipal (masyarakat) dalam kemungkinan terjadinya penyelewengan. Sehubungan dengan hal tersebut *agency theory* berusaha untuk memberikan jawaban terkait permasalahan keagenan yang terjadi kepada para pihak yang melakukan kerja sama dengan memiliki tujuan serta pembagian dalam kerja yang berbeda dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa

Kata pengelolaan sangat erat hubungannya dengan manajemen, juga dapat diartikan sebagai pengaturan atau pengurusan Menurut Suharsimi Arikunto (1993:31). Dalam hal ini, Fattah (2004:1) berpendapat bahwa melakukan proses manajemen tentu akan ada tmelibatkan fungsi-fungsi pokok yang akan ditampilkan yaitu perencanaan *(planning),* pengorganisasian *(organising),* pemimpin *(leading),* dan pengawasan *(controlling).* Adapun pengertian desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat di-Indonesia dan menjadi bagian yang tidak akan mampu dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Adapun pengelolaan dana desa menurut PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa mendefenisikan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Kekuasan dalam pengelolaan keuangan desa diberikan kepada Kepala desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) selaku petugas yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi.

Penerapan *Good Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* memberi pendapat bahwa pemerintahan di-Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menerapkan standar *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang terlebih dahulu telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3). Mardiasmo (2009) menjelaskan *good governance* sebagai sebuah konsep yang melakukan pendekatan melalui orientasi kepada pembangunan sektor publik dalam pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penerpaan *good governance* yang dikemukakan oleh Kurniawan (2005:12) merupakan bentuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan pada interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat.

Yang merupakan kunci utama dalam memahami *good governance* sendiri adalah terdapat pada penerapan yang dilakukan pada prinsip-prinsip didalamnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya adalah Transparansi *(Transparancy),* terwujudnya Akuntabilitas *(Accountability),* dan adanya Partisipasi *(Participation)* oleh masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Menurut Taufik Taufeni (2017) *good governance* merupakan suatu proses dan struktur yang dapat digunakan dalam mengarahkan dan mengelola kegiatan

kearah peningkatan agar adanya pertumbuhan dan akuntabilitas yang terwujud. Diharapkan mampu mnecapai tujuan dari penerapan *good governance* sebagai bentuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia yang *solid* dan dapat bertanggungjawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan pada interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat menurut Kurniawan (2005:12).

Dikarenakan adanya penerapan *good governance* yang baik didalam pengelolaan dana desa mampu menciptakan tata kelola yang baik pada program dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa. Sehingga akan mampu meningkatkan pembangunana dan mampu mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia secara adil dan merata hingga pada wilayah terpencil.

Penelitian dalam untuk mengetahui tentang efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai pada penelitian yang telah dilakukan oleh Asni (2013) dan Thomas (2013). Untuk mengetahui pentingnya penerapan *good governance* pada sektor publik, kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah telah dilakukan penelitian oleh Taufik Taufeni, *et al.,* 2013. Rustiarini (2016) juga telah melakukan penelitain terhadap pengaruh *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang hanya sebatas pada keterkaitan secara normatif saja sesuai dengan mekanisme dalam peraturan.

Selanjutnya pentingnya akuntabilitas yang ditekankan didalan *non governnce organization* pada organisasi nirlaba telah dilakukan oleh Said, *et al.,* 2018. Maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H: Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

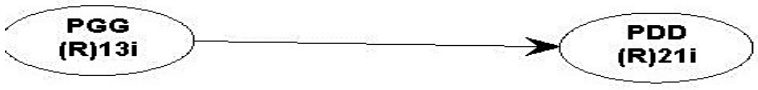

Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) adalah pengelolaan dana desa dan sebagai variabel bebasnya (independen) adalah penerapan *good governance*. Dengan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 34 desa dari keseluruhan populasi sebanyak 242 desa di Kabupaten Kampar. Adapun subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi, sehingga berjumlah 4 orang fungsi dari aparatur desa. Jumlah responden yang digunakan didalam penelitian ini sebnayak 136 responden. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan (*judgement*) tertentu (Sugiyono, 2016).

Terdapat beberapa kriteria penentu sampel pada penelitian ini yang diantaranya adalah desa yang berada pada kategori tertinggal, perolehan jumlah

dana desa yang besar dan banyaknya penduduk miskin pada desa. Penggunaan teknik analisis data pada penelitian ini dengan pendekatan analisis *Partial Leats Square (PLS)* melalui WarpPLS 6.0. teknik ini dilakukan untuk memberi penjelasan yang akurat terkait penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa pada desa yang ada Kabupaten Kampar.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Tabel 1
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	136	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang kembali	136	100%

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel 1 menunjukan bahwa kuesioner yang di sebar berjumlah 136 (100%). Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan tidak ada kuesioner yang tidak kembali. Sehingga diperoleh *respon rate* dari penelitian sebesar 100 persen.

Tabel 2
Deskriptif Demografi Responden

Uraian	Responden	%
Jenis kelamin		
Pria	72	53%
Wanita	64	47%
Pendidikan		
SMA/SLTA	50	37%
Diploma 3	4	3%
Strata 1 (s1)	82	60%
Kategori	**Rata-Rata**	
Usia	34 Tahun	
Lama bekerja pd Kantor desa	8 Tahun	
Lama bekerja pd Posisi sekarang	5 Tahun	

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa banyaknya aparatur desa yang berjenis kelamin pria adalah 72 orang (53%), dan sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 64 orang (47%). Adapun tingkat pendidikan aparatur desa mayoritas telah S1 berjumlah 82 orang (60%), dengan tingkat pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 4 orang (3%) dan selebihnya memiliki tingkat pendidikan SMA/SLTA sebanyak 50 orang (37%). Adapun usia rata-rata yang dimiliki aparatur desa adalah 34 tahun, dengan masa lama bekerja dikantor desa rata-rata selama 8 tahun, dan bekerja pada posisi desa karang rata-rata telah selama 5 tahun lamanya.

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai tertinggi, nilai terendah, mean, dan standar deviasi.

Dibawah ini merupakan tabel yang menyajikan data nilai tertinggi, nilai terendah, mean, dan standar deviasi.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif (max, min, mean, dan SD)

variabel	Min	Max	Mean	Stdr Dev
Pengaruh *good governance*	31,00	65,00	56,48	6,32
Pengelolaan dana desa	42,00	105,00	89,42	11,54

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Penerapan *good governance* memperoleh nilai rata-rata sebesar 56,4853 dengan perolehan kategori baik yang artinya pengelolaan dana desa telah mampu dikelola dengan baik. Terbukti dengan hasil yang diperoleh dari nilai rata-rata yang lebih besar (56,4853) dari pada standar deviasinya (6,32805). Pada nilai minimum yang diperoleh penerapan *good governance* mampu menunjukkan presepsi responden yang tidak setuju maupun setuju (netral) sebesar 31. Untuk nilai maksimum yang menunjukkan presepsi responden sangat setuju yaitu sebesar 65 dan tidak ada yang memilih sangat tidak setuju. Adapun selanjutnya pada pengelolaan dana desa berdasarkan pengujian statistik tabel diatas, memperoleh nilai rata-rata sebesar 89,4265 dengan kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar (89,4265) dari pada standar deviasinya (11,54164). Nilai minimum pada pengelolaan dana desa menunjukkan presepsi responden yang tidak setuju maupun setuju (netral) sebesar 42. Untuk nilai maksimum yang menunjukkan presepsi responden setuju yaitu sebesar 105, namun dalam hal ini tidak ada responden yang memilih sangat tidak setuju.

Hasil uji bias metode umum *(common method bias*)

Hasil uji bias metode umum *(common method bias*) dengan melihat nilai full collinearity VIF setiap variabel yang ada dalam penelitian ini.

Tabel 4
Nilai *Full Collinearity VIF Konstruk* Dan Pengelolaan Dana Desa (PDD), dan Penerapan *Good Governance* (PGG)

	PGG	PDD
Full collinearity VIFs	1,347	1,347

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Pada tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa Seluruh variabel konstruk memiliki nilai *full collinearity VIF* < dari 3,3 yakni konstruk PGG (1,347) dan PDD (1,347). Dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada seluruh variabel konstruk dalam penelitian ini bebas dari permasalahan kolinearitas atau *common method bias.*

Hasil uji Validitas

Hasil Uji Validitas Convergent

Hasil uji validitas convergent dengan melihat nilai indicator loading atau faktor setiap indikator pada konstruk dan dimensi penerapan *good governance*

dalam penelitian ini.

Tabel 5
Nilai *Indicator Loading, P-Value* dan AVE Konstruk Penerapan *Good Governance*

	Indicator Loading	P Value	AVE
PGG1	0.89	<0.001	
PGG2	0.637	<0.001	
PGG3	0.762	<0.001	
PGG4	0.884	<0.001	
PGG5	0.873	<0.001	
PGG6	0.513	<0.001	
PGG7	0.527	<0.001	**0.561**
PGG8	0.749	<0.001	
PGG9	0.861	<0.001	
PGG10	0.628	<0.001	
PGG11	0.741	<0.001	
PGG12	0.812	<0.001	
PGG13	0.724	<0.001	

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Pada tebel 5 dapat dilihat bahwa nilai *indicator loading* atau *loading factor* konstruk penerapan *good governance*, terdapat indikator GG2 (0,637) < 0,70, GG6 (0,513) < 0,70, GG7 (0,527) < 0,70 dan GG10 (0,628) < 0,70. Namun peneliti tetap mempertahankan indikator GG2, GG6, GG7 dan GG10 dalam penelitian ini, karena menurut Hair dkk (2013) dalam Sholihin dan Ratmono (2013:66) loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Seluruh indikator memiliki signifikansi *p-value* dibawah 0,05 dan nilai *everage variance extracted* (AVE) diatas 0,50.

Hasil uji *validitas convergent* dengan melihat nilai indicator loading atau loading faktor setiap indikator pada konstruk kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Nilai *Indicator Loading, P-Value* dan AVE Konstruk Pengelolaan Dana Desa

	Indicator Loading	P Value	AVE
PDD1	0.874	<0.001	
PDD2	0.875	<0.001	
PDD3	0.761	<0.001	
PDD4	0.686	<0.001	
PDD5	0.768	<0.001	
PDD6	0.807	<0.001	**0.561**
PDD7	0.858	<0.001	
PDD8	0.859	<0.001	
PDD9	0.629	<0.001	
PDD10	0.831	<0.001	
PDD11	0.786	<0.001	
PDD12	0.784	<0.001	

	Indicator Loading	P Value	AVE
PDD13	0.713	<0.001	
PDD14	0.827	<0.001	
PDD15	0.769	<0.001	
PDD16	0.836	<0.001	
PDD17	0.747	<0.001	
PDD18	0.838	<0.001	
PDD19	0.821	<0.001	
PDD20	0.839	<0.001	
PDD21	0.7	<0.001	

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Pada tebel 6 dapat dilihat bahwa nilai *indicator loading* atau *loading factor* konstruk pengelolaan dana desa, terdapat indikator PDD4 (0,686) < 0,70 dan PDD9 (0,629). Namun peneliti tetap mempertahankan indikator PDD4 dan PDD9 dalam penelitian ini, karena menurut Hair dkk (2013) dalam Sholihin dan Ratmono (2013:66) loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Seluruh indikator memiliki signifikansi p-value dibawah 0,05 dan nilai everage variance extracted (AVE) di atas 0,50.

Hasil Uji Validitas *Discriminant*

Validitas diskriminan (discriminant) bertujuan untuk menguji item/ indikator dari dua konstruk yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali & Latan, 2014:91).

Hasil *Cross Loading*

Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik dari pada ukuran blok lainnya (Ghozali & Latan, 2014:40). Untuk melihat hasil uji validitas discriminant dengan membandingkan nilai korelasi sesama indikator dalam konstruk dengan variabel lain, dapat dilihat pada tabel 9 dengan melihat nilai *cross loading*.

Tabel 7
Nilai *Cross Loading* Konstruk

	GG	PDD
PGG1	0.89	0.01
PGG2	0.637	0.044
PGG3	0.762	0.067
PGG4	0.884	-0.006
PGG5	0.873	-0.022
PGG6	0.513	0.364
PGG7	0.527	-0.285
PGG8	0.749	-0.21
PGG9	0.861	0.037
PGG10	0.628	0.028
PGG11	0.741	0.054
PGG12	0.812	0.003
PGG13	0.724	-0.048
PDD1	0.029	0.874
PDD2	-0.014	0.875

	GG	PDD
PDD3	0.08	0.761
PDD4	0.002	0.686
PDD5	0.042	0.768
PDD6	-0.064	0.807
PDD7	0.017	0.858
PDD8	-0.047	0.859
PDD9	-0.014	0.629
PDD10	0.09	0.831
PDD11	0.029	0.786
PDD12	-0.133	0.784
PDD13	-0.079	0.713
PDD14	-0.068	0.827
PDD15	0.066	0.769
PDD16	0.08	0.836
PDD17	-0.03	0.747
PDD18	-0.085	0.838
PDD19	0.081	0.821
PDD20	-0.046	0.839
PDD21	0.068	0.7

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel diatas memperlihatkan nilai korelasi seluruh indikator dari variabel konstruk mempunyai korelasi yang tinggi kepada masing-masing variabel konstruknya. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh indikator yang ada pada variabel konstruk diatas dapat memenuhi persyaratan validitas discriminant.

Hasil Akar Kuadrat (*Square Roots*) Average Variance Extracted (AVE)

Pengujian dari hasil validitas determinan yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE > dari korelasi antar konstruk laten (Ghozali & Latan, 2014:95).

Tabel 8
Nilai Akar Kuadrat AVE Seluruh Variabel Konstruk

	PGG	PDD
PGG	**0.749**	
PDD	0.508	**0.794**

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel diatas menjelaskan bahwa masing-masing dari variabel konstruk varian memiliki lebih banyak di dalam pengukuran item/ indikatornya sendiri dibandingkan dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain. Sehingga memperoleh nilai yang baik dan memenuhi syarat dari validitas discriminant.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil *Indicator Reliablity*

Indicator reliability yaitu mengukur besar variance dari indikator yang digunakan untuk menjelaskan konstruk laten (Ghozali & Latan, 2014:93).

Tabel 9
Nilai Cronbach's Alpha seluruh Variabel Konstruk

PGG	PDD

Cronbach's Alpha	0.931	0.970

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel diatas memperlihatkan nilai dari *crombach's alpha* variabel konstruk laten yaitu diatas 0,70 yang berarti bahwa seluruh variabel konstruk telah memenuhi persyaratan reliabilitas.

Hasil *Internal Consistency Reliability*

Pengujian ini dapat menggambarkan estimasi dari reliabilitas berdasarkan pada rata-rata korelasi antar item-item di dalam sebuah pengujian (Ghozali & Latan, 2014:99).

Tabel 10
Nilai *Composite Reliability* Variabel Alpha Seluruh Konstruk

	PGG	PDD
Composite Raeliab.	0.942	0.937

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Hal ini memperlihatkan seluruh nilai dari *composite reliability* variabel konstruk laten diatas 0,70 yang berarti dapat memenuhi persyaratan reliabilitas.

Hasil Evaluasi Model Struktural
Hasil Koefisien Determinasi

Dibawah ini akan memperlihatkan hasil dari R-squared yaitu:

Tabel 11
Nilai R-squared dan Adjusted R^2

	PGG	PDD
R-suared		0.290

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Memperoleh nilai R-squared pengelolaan dana desa (PDD) sebesar 0,290 yang berarti bahwa seluruh variabel bebas adalah sebesar 29% dan sisanya 71% masih dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian yang dilakukan.

Hasil Model *Fit* dan *Quality Indexes*
Hasil Model *Fit*

Perolehan nilai *average path coefficient* (APC) sebesar 0,543 dengan p-value < 0,001, nilai dari *average R-squared* (ARS) sebesar 0,295 dengan p-value < 0,001. adapun *average adjusted R-squared* (AARS) sebesar 0,290 dengan p-value < 0,001, dapat menjelaskan bahwa model dari penelitian mempunyai *fit* yang baik.

Adapun nilai *average variance inflation factor* (AVIF) *not availabel* dan *average full collinearity variance inflation factor* (AFVIF) sebesar 1,347 <3,3, ini dapat diartikan bahwa tidak ada masalah multikolonieritas antar indikator dan variabel eksogen dan nilai *tenenhaus goodness of fit* (GOF) sebesar 0,419 > 0,36, memperlihatkan jika model tersebut memiliki kekuatan prediksi yang besar atau *fit model* sangat baik.

Tabel 12
Nilai Indikator-Indikator *Fit* dan *Quality Indexes*

```
Model fit and quality indices
-----------------------------

Average path coefficient (APC)=0.543, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.295, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.290, P<0.001
Average block VIF (AVIF) not available
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.347, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.419, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7
```

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Pembahasana Dan Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam memprediksi hubungan kausalitas pada SEM-PLS menggunakan WrpPLS 6.0 dapat dilakukan dengan melihat T-Statistik yang ada pada tabel *path coefficien, p-value, standard errors* dan *effect sizes for path coefficients.*

Tabel 13
Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

	P-value	Effect Size	Path Coeficient	Standard Error
PGG → PDD	0,001	0.295	0.543	0.076

Sumber: Data Primer Diolah (2019)

Tabel diatas menjelaskan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis terkait variabel penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut diterima. Nilai yang ada pada uji statistik P value diperoleh signifikan sebesar 0,001 (dibawah α:0,05), dengan *effect size* 0,295 > 0,15 (pengaruh yang kuat).

Dapat disimpulkan penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa dengan nilai variabel *path coefficient* sebesar 0,543 (berhubungan positif). Dengan arti penerapan *good governance* akan mampu menjadi pengawal untuk aparatur desa dalam melakuakan pengelolaan dana desa secara lebih baik.

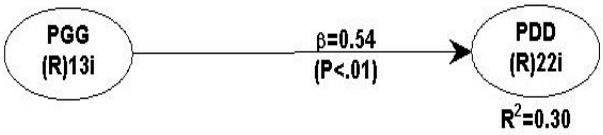

Gambar 2
Model Persamaan Struktural Dengan *Path Coefficients, P-Values dan Effect Size*

SIMPULAN

Pengujian diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang kuat. Ini berarti penerpan *good governance* yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa akan mampu meningkatkan tata kelola yang baik dengan mewujudkan transparansi, akuntabilitas dana adanya partisipasi masyarakat sehingga pengelolaan dana desa yang dilakukan dapat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dengan penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa akan mampu menurunkan tingkat permasalahan dan kasus yang dapat merugikan negara.

Pada penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi perlu disampaikan sebagai saran untuk beberapa pihak yang terkait, yaitu: 1). Penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa hendaknya dapat ditingkatkan dan dipahami maksud beserta tujuannya oleh aparatur desa di Kabupaten Kampar. 2). Pemerintah desa yang ada pada Kabupaten Kampar harus menjunjung tinggi prinsip transparansi didalam pengelolaan dana desa. 3). Mampu di wujudkannya akuntabilitas pada setiap aktivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa di Kabupaten Kampar dan adanya keikut sertaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan. Hal ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain seperti kompetensi, motivasi dan komitmen yang diduga berpengaruh pada pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Nunuy Nur dan Dien Noviany Rahmatika. 2014. Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implication On Good Governance (Research on Local Government Indonesia). *Research International Journal of Businiess, Economic and Law*.

Asni, Fauzi. 2013. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Menunjang Kemandirian Ekonomi Desa di Kabupaten Siak. *Disertasi.* Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Ghozali, Imam., & Hengky Latan. 2014. *Partial Least Squares :* Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 3.0 edisi kedua. Universitas Diponegoro, Semarang.

Halawi, Ali H. 2018. The influence of organizational Commitment on performance in Lebanese banks. International journals.

http://www.harianberantas.co.id/2019/07/ dugaan-korupsi-add-kades-tanjung-alai.html."Dugaan korupsi anggran dana desa oleh kades Tanjung Alai". Diunduh 25 sepetember 2019.

https://republika.co.id/berita/koran/kesra/o7rso516/ dana-desa-di-kampar-dinilai-salah-prioritas. Diakses 10 Juli 2019. "Dana Desa Dikampar Dinilai Salah Prioritas". Zulqaidah (2016). Diakses 10 Juli 2019.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Indriasih, Dewi. 2014. The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting In Local Government. ISSN Vol.5, No.20.

Kurniawan, Agung. 2005. Tranformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Riau. (2015). Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Kampar Tahun 2015.

Luthans, Fred. 2012. "Perilaku Organisasi". Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Mekta, Hendrawan Qonit Dan Siswanto. 2017. Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Indra Kelana Yogyakarta The Effect Of Job Satisfacation And Organizational Commitment On Employee Performance Of Pt. Indra Kelana Yogyakarta. *Jurnal Profita Edisi 2 Tahun 2017.*

Ponamon, I.F. 2014. Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Universitas Sam Ratulangi, 9 (2): 68-80.

Rustiarini, Ni Wayan. 2016. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi* XIX.

Said, J., Alam, M.M., & Johari, R.J. 2018. *Assessment of Accountability Practices in the Public Sector of Malaysia. Asia-Pacific Management Accounting* Journal. 13(1), 167-184.

Siwambudi I G Ngurah, Gerianta Wirawan Yasa, dan I Dewa Nyoman Badera. 2017. Komitment Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6.1 (2017): 385-416.

Taufik, Taufeni. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Pekbis Jurnal*, Vol.7, No.01.

Taufik Taufeni dan Dian Kamala. 2013. Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik. *Pekbis Jurnal*, Vol. 5, No.1. Maret 2013. Maret 2015.

Taufik Taufeni, Y. Anisma Dan Yusralaini. 2017. Analysis of factors influence in realization of good governance (Study on SKPD (Tax Assessments) Pekanbaru City). International Journal of Applied Business and Economic Research 15(15):279-290.

Taufik Taufeni. 2019. The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention. *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 8, Issue 09.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *E-journal Pemerintahan Integratif*. Vo. 1, No. 1, pp. 51- 64.